



Judul : Ngadu ke DPR, rakyat susah punya rumah
Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 11

Ngadu Ke DPR

Rakyat Susah Punya Rumah

HINGGA saat ini, masyarakat berpenghasilan rendah kian sulit memiliki rumah tinggal. Pada 2019 saja, slot atau kuota rumah untuk pembiayaan, telah habis pada September. Bisa dibayangkan pada 2020 ini akan habis di bulan Mei.

Artinya, masyarakat Indonesia, khususnya yang berpenghasilan rendah, misalnya dengan gaji rata-rata Rp 4 juta per bulan, akan kesulitan memiliki rumah. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Aliansi Pengembangan Perumahan Nasional (Appernas Jaya), Andri-liwan Muhammad.

"Masalah inilah antara lain yang kami bicarakan dengan DPR," katanya, sebelum mengadakan rapat dengan Komisi V DPR di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Permasalahan lain membuat masyarakat kesulitan memiliki rumah, lanjut Andri-liwan, justru dari pihak perbankan. Ada kecenderungan, perbankan mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk punya rumah. "KT, slip gaji, sudah ada. Tapi karena tiba-tiba si istrinya bermasalah sedikit dengan perbankan, akhirnya tidak bisa membeli rumah. Padahal mereka mampu," paparnya.

Dari penelitian Appernas Jaya, ujar Andri-liwan lagi, kurang lebih 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah mengalami persoalan serupa di bagian administrasi. Padahal dari sisi finansial, mereka mampu.

Ironisnya, hal ini juga dialami kalangan profesional, termasuk wartawan. Mengingat harga tanah di daerah semakin mahal. "Appernas Jaya mem-

bawa solusi yang bisa disampaikan kepada pemerintah sekarang," yakinnya.

Andri-liwan berharap, Komisi V DPR bisa bersuara menyatakan kepada pemerintah. Mencarikan program yang tidak mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah. "Jangan hanya mengeluarkan program bagus. Kenyataannya di lapangan malah susah," sindirnya.

Appernas Jaya, kata Andri-liwan, sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR dan dengan pemerintah daerah (Pemda). Pihaknya menunggu sikap DPR menyikapi program yang diberikan pemerintah saat ini. Jangan mempersulit lagi seperti di 2019.

Solusi yang ditawarkan Appernas Jaya, terangnya, adalah dengan membuka program perumahan Appernas Jaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Caranya, dengan menyicil tanah per bulan permeter.

"Dengan 60 meter, calon pemilik rumah dalam waktu 5 tahun sudah memiliki tanah. Pemerintah hanya membantu untuk konstruksinya saja. Secara hukum, lima tahun mereka sudah punya rumah," kata Andri-liwan.

Selain itu, Appernas Jaya juga berusaha bisa membuat pendanaan sendiri. Karena mereka melihat BTN atau bank pemerintah tidak mampu. "Kami akan bekerja sama dengan pihak Jepang. Membangun pendanaan sendiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai komitmen kami," pungkasnya. ■ TIF